PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN, *JOB RELEVANT INFORMATION*, AKUNTABILITAS PUBLIK, DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL
(Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Magelang)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1

Disusun Oleh:
Cleo Yunita
NIM. 16.0102.0006

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2020

PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN, *JOB RELEVANT INFORMATION*, AKUNTABILITAS PUBLIK, DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL
(Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Magelang)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang

Disusun oleh:
Cleo Yunita
NIM. 16.0102.0006

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2020

LEMBAR PENGESAHAN



SKRIPSI

PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN, *JOB RELEVANT INFORMATION*, AKUNTABILITAS PUBLIK, DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL
(Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Magelang)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Cleo Yunita
NPM **16.0102.0006**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal **13 Agustus 2020**

Susunan Tim Penguji

Pembimbing
Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc., Ak
Pembimbing I

Farida, S.E., M.Si., Ak., CA
Pembimbing II

Tim Penguji
Dr. Wawan Sadiyo N, S.E., M.Si., Ak., CA
Ketua

Dr. Barkah Susanto, S.E., M.Sc., Ak
Sekretaris

Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc., Ak
Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1
Tanggal 07 SEP 2020

Dra. Marlina Kurnia, MM
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cleo Yunita

NIM : 16.0102.0006

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN, *JOB RELEVANT INFORMATION*, AKUNTABILITAS PUBLIK, DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL (Studi Empiris Pada OPD Kabupaten Magelang)

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 13 Agustus 2020

Peneliti



Cleo Yunita

NPM. 16.0102.0006

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Cleo Yunita
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat, Tanggal lahir	: Surabaya, 17 Juni 1998
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Alamat Rumah	: Botton Kopen, RT 04 RW 07, Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah
Alamat E-Mail	: yunitacleo98@gmail.com

Pendidikan Formal

TK	(2002-2004)	: TK Hang Tuah 7 Surabaya
SD	(2004-2010)	: SD N 2 Purwokerto Kulon
SMP	(2010-2013)	: SMP Gunungjati 1 Purwokerto
SMA	(2013-2016)	: MAN 1 Kabupaten Magelang
PT	(2016-2020)	: S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang

Pendidikan Non Formal:

- *Basic Listening and Speaking Course* di UMMagelang *Language Center*
- Pelatihan Dasar Keterampilan Komputer di UPT Pusat Komputer UMMagelang

Pengalaman Organisasi:

- Anggota dan Pengurus (HMA) (2017-2018)

Magelang, 5 Agustus 2020



Cleo Yunita

MOTTO

"*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka mana kala kamu telah selesai (dari urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain) Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap"*

QS. Al-Insyirah:6-8

"*Semua impian kita bisa terwujud jika kita memiliki keberanian untuk menjemputnya"*

~Walt Disney

"*Lakukan yang terbaik, hingga ku tak bisa menyalahkan diri sendiri atas semua yang terjadi"*

~Magdalna Neuner

"*Sukses berjalan dari kegagalan satu menuju kegagalan lain tanpa kehilangan semangat dan antusiasme"*

~Winston Churchill

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada ALLAH SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-NYA, atas karunianya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul "**Pengaruh Partisipasi Anggaran, Akuntansi Pertanggungjawaban, *Job Relevant Information*, Akuntabilitas Publik, dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magelang)**".

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Akuntansi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang. Selama penilitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu peneliti ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Nur Laila Yuliani S.E., M.Sc., Ak selaku Dosen Pembimbing 1 (satu) yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
2. Ibu Farida S.E., M.Si., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing 2 (dua) yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
3. Dr. Wawan Sadtyo Nugroho, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
4. Seluruh Dosen Pengajar yang telah memberikan bekal ilmu yang tak ternilai harganya dan telah membantu kelancaran selama menjalankan studi di Universitas Muhammadiyah Magelang.
5. Orang tua tercinta ibu haryanti yang telah memberikan segala dukungan, doa, dan semangatnya untuk kesuksesan putri bungsunya dan kakak saya yang terkasih Goffar Utomo, Mhd.Farhan Putra S S, dan Raisha Naydilla dan sahabat saya yang tergabung di Sobat Misqueen dan Praba Setya Safitri yang telah memberikan doa dan dukungan selama penyelesaian skripsi.
6. Para perangkat OPD Kabupaten Magelang atas kesediaannya sebagai responden dalam penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman akuntansi Angkatan 2016 serta teman satu dosen pembimbing dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan.

Magelang, 13 Agustus 2020

Cleo Yunita
NIM. 16.0102.0006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PENGESAHAN ii
SURAT PERNYATAAN iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP iv
MOTTO v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR LAMPIRAN xi
ABSTRAK xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Kontribusi Penelitian 9
E. Sistematika Penulisan 9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 11
A. Telaah Literatur 11
B. Telaah Penelitian Sebelumnya 20
C. Perumusan Hipotesis 23
1. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial. 23
2. Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial 24
3. Pengaruh *Job Relevant* Information *(JRI)* Terhadap Kinerja Manajerial . 26
4. Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial 27
5. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial 28
D. Model Penelitian 30
BAB III METODE PENELITIAN 31
A. Populasi dan Sampel 31

B. Teknik Pengambilan Sampel 32
C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel 33
D. Alat Analisis Data 36
1. Statistik Deskriptif 36
2. Uji Kualitas Data 36
3. Analisis Regresi Linear Berganda 37
4. Pengujian Hipotesis 38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 41
A. Statistik Deskriptif 41
B. Statistik Deskriptif Responden 42
C. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 43
D. Uji Kualitas Data 45
E. Analisis Regresi Linear Berganda 48
F. Pengujian Hipotesis 49
1. Uji R^2 (Koefisien Determinasi) 49
2. Uji F 50
3. Uji t 51
G. Pembahasan 54
1. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial 54
2. Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban terhadap Kinerja Manajerial .. 55
3. Pengaruh *Job Relevant Information* terhadap Kinerja Manajerial 57
4. Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial 58
5. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial 59
BAB V KESIMPULAN 61
A. Kesimpulan 61
B. Keterbatasan Penelitian 61
C. Saran 62
DAFTAR PUSTAKA 63
LAMPIRAN 70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Telaah Penelitian Sebelumnya 20
Tabel 3.1 Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel 33
Tabel 4.1 Sampel Penelitian dan tingkat pengembalian kuesioner..... 41
Tabel 4.2 Profil Responden..... 42
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian..... 43
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas..... 46
Tabel 4.5 Cross Loading 46
Tabel 4.6 Pengujian Reliabilitas 48
Tabel 4.7 Koefisien Regresi..... 48
Tabel 4.8 Uji R^2 49
Tabel 4.9 Uji F 50
Tabel 4.10 Uji t 51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Penelitian 30
Gambar 3.1 Uji F..... 39
Gambar 3.2 Uji t..... 40
Gambar 4.1 Nilai Uji F..... 51
Gambar 4.2 Nilai Uji t Partisipasi Anggaran 52
Gambar 4.3 Nilai Uji t Akuntansi Pertanggungjawaban..... 52
Gambar 4.4 Nilai Uji t Job Relevant Information..... 53
Gambar 4.5 Nilai Uji t Akuntabilitas Publik..... 53
Gambar 4.6 Nilai Uji t Kejelasan Sasaran Anggaran..... 54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian 71
Lampiran 2. Daftar Sampel dan Pengembalian Kuesioner 79
Lampiran 3. Tabulasi Data Kuesioner (Data Mentah) 80
Lampiran 4. Tabulasi Data Kuesioner (Setelah validasi) 93
Lampiran 5. Statistik Deskriptif 105
Lampiran 6. Uji Validitas 106
Lampiran 7. Uji Reliabilitas 120
Lampiran 8. Regresi Linier 122
Lampiran 9. Bukti Penerimaan Kuesioner 123
Lampiran 10. Surat Izin Penelitian 126

ABSTRAK

PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN, *JOB RELEVANT INFORMATION*, AKUNTABILITAS PUBLIK, DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL (Studi Empiris Pada Opd Kabupaten Magelang)

Oleh:
Cleo Yunita

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Partisipasi Anggaran, Akuntansi Pertanggungjawaban, *Job Relevant Information*, Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada 23 OPD di Kabupaten Magelang. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 81 responden, berdasarkan metode *purposive sampling,* yaitu pegawai OPD yang mempunyai jabatan fungsional sebagai kepala dinas, kasubag, bendahara, dan staf keuangan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Sedangkan partisipasi anggaran, *job relevant information*, akuntabilitas publik, dan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Kata kunci: ***partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, job relevant information akuntabilitas publik, kejelasan sasaran anggaran, dan kinerja manajerial.***

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Implementasi dari perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam penyelenggaraan pemerintah daerah membawa dampak perubahan yang mendasar dalam pemerintahan yaitu diberlakukannya otonomi daerah. Hal ini menekankan pada desentralisasi yaitu pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah mengubah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemerintah daerah dari pertanggungjawaban *vertical* (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban *horizontal* (kepada masyarakat melalui DPRD), karena pemerintah daerah dituntut untuk dapat mengelola daerahnya dengan baik dan akuntabilitas, sehingga dapat mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat (Fidayati & Yuliani, 2017).

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara pada tahun 2015 - 2019 asumsi makro yang sebelumnya telah diprediksi meleset dari target. Faktor yang menyebabkan meleset yaitu terdiri dari faktor eksternal dan faktor domestik. Realisasi asumsi makro yang mengalami perubahan dan tidak mencapai target APBN-P yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga, harga minyak mentah Indonesia, *lifting* minyak. Realisasi belanja negara terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat dan transfer daerah (www.kemenkeu.go.id).

Fenomena yang terjadi di daerah Kabupaten Magelang realisasi anggaran belanja pemerintah masih di bawah target dan dalam pelaksanaan penyerapan anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya mengalami kegagalan. Menurut Bupati Magelang Zaenal Arifin SIP, realisasi keuangan dan pencapaian fisik masih rendah di bawah target yang telah ditetapkan sebelumnya (jogja.tribunnews.com).

Realisasi triwulan II TA tahun 2015 penyerapan anggaran APBD Kabupaten Magelang tidak mencapai target. Realisasi fisik sampai dengan akhir triwulan II alokasi belanja langsung APBD Kabupaten Magelang hanya tercapai sebesar 15,89% dari target 33,06%. Realisasi fisik tertimbang belanja langsung APBD TA 2016 sebesar 31,30% dari target 40,86%, namun terdapat kendala pada sisi penyerapan anggaran. Berdasarkan data dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) realisasi keuangan belanja langsung sebesar 22,82% dari target 44,85%. Sedangkan pada tahun anggaran 2019 realisasi fisik yang tercapai hanya 58% dari target dan realisasi anggaran belanja langsung yang tercapai sebesar 36% dari target 79% (magelangkab.go.id)

Evaluasi yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten magelang terhadap akuntabilitas kinerja OPD kabupaten magelang masih dijumpai kelemahan / kekurangan. Beberapa hal yang masih dijumpai kelemahan / kekurangan dalam akuntabilitas kinerja opd yaitu, sasaran dalam renstra agar berorientasi hasil dengan indikator tujuan yang SMART dan selaras dengan RPJMD, mekanisme pengumpulan data kinerja belum tersusun dan agar dikembangkan dengan teknologi informasi, rencana aksi atas kinerja belum dievaluasi dan dimonitor pencapaian kinerjanya secara berkala baik secara bulanan/triwulan/semester (magelangkab.go.id).

Usaha yang dilakukan pemerintah daerah sebagai salah satu organisasi sektor publik yang diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerah yaitu mempertahankan atau meningkatkan kinerja manajerial. Kinerja manajerial digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan suatu organisasi sehingga pencapaian kinerja pemerintah dengan baik.

Berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terkait beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial telah banyak dilakukan. Faktor pertama yang diduga mempengaruhi kinerja manajerial, adalah partisipasi anggaran. Partisipasi anggaran akan dapat meningkatkan kualitas anggaran yang dibuat dan dapat berdampak positif terhadap kinerja manajerial dengan adanya partisipasi dari manajer dan bawahan dalam memberi masukan untuk penyusunan anggaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Natalya & Kusumawardani (2016) partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Semakin tinggi tingkat partisipasi yang dilakukan oleh para manajer dan bawahan, maka akan menghasilkan anggaran yang sesuai dengan target organisasi, sehingga meningkatkan kinerja manajerial organisasi. Begitu pula penelitian yang dilakukan Aini (2018) dan Ramadhini et al (2019) yang menyatakan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi manajer dan bawahan dalam proses penyusunan anggaran maka semakin baik kinerja manajerialnya. Hasil yang berbeda diperoleh dari penelitian Nengsy (2019), menunjukkan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal ini dikarenakan partisipasi dari bawahan belum diterapkan secara efektif di instansi terkait, atau pemegang kuasa anggaran cenderung mengambil keputusan sendiri dalam menetapkan anggaran. Begitu pula penelitian yang dilakukan Silitonga & Astuty (2018), dan Ernawati (2017) menyatakan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja manajerial yaitu akuntansi pertanggungjawaban. Pimpinan instansi maupun organisasi tidak dapat mengendalikan pekerjaan bawahannya secara langsung, oleh karena itu akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk menilai kinerja kepala seksi atau kepala bagian. Penelitian yang dilakukan oleh Nengsy (2019) menunjukkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Sedangkan

penelitian yang dilakukan Amalia (2019) menunjukkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Penelitian yang dilakukan Silitonga & Astuty (2018) serta Natalya & Kusumawardani (2016) menemukan bahwa akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi akuntansi pertanggungjawaban yang ada pada masing-masing individu dalam lingkungan pertanggungjawaban, maka dapat menyebabkan kinerja manajerial semakin meningkat

Faktor ketiga yang mempengaruhi kinerja manajerial adalah *Job Relevant Information* (JRI). Informasi yang terdapat di *Job Relevant Information* (JRI) dapat meningkatkan pemahaman kondisi kinerja dan lingkungan organisasi melalui informasi yang diperoleh baik dari bawahan maupun atasan agar tercapai kinerja manajerial yang maksimal. Penelitian yang dilakukan oleh Nengsy (2019) menunjukkan hasil bahwa *job relevant information* (JRI) berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fidayati & Yuliani (2017) serta Nugraheni (2015) menemukan hasil bahwa *job relevant information* (JRI) berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Namun penelitian yang dilakukan oleh Syukri et al., (2019) menemukan hasil bahwa *job relevant information* (JRI) tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Akuntabilitas publik merupakan salah satu faktor lain yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Melia & Sari (2019) menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas

publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan Kanji (2018) serta Efrizar (2017) yang menemukan hasil bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya akuntabilitas publik organisasi sektor publik pemerintah daerah memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan kepada masyarakat atas dana yang berasal dari masyarakat tersebut. Namun penelitian yang dilakukan Heski et al (2017) serta Safitri et al (2015) menemukan hasil bahwa akuntabilitas publik tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Kejelasan sasaran anggaran yang diduga sebagai faktor lain dapat mempengaruhi kinerja manajerial. Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran dalam organisasi sektor publik memberi kemudahan pemerintah dalam Menyusun rencana kerja dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Ufairah & Zamzami (2016) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Namun Penelitian yang dilakukan oleh Melia & Sari (2019) menemukan hasil bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Kanji (2018) serta Heski et al (2017) yang menemukan hasil bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal ini dikarenakan dengan adanya kejelasan sasaran anggaran dalam organisasi, dapat mendorong bawahan dan manajer lebih giat dalam mencapai sasaran sehingga kinerja yang dihasilkan lebih tinggi dengan adanya tujuan sasaran yang jelas.

Penelitian ini mengembangkan penelitian Nengsy (2019), dengan persamaan menggunakan semua variabel yang digunakan pada penelitian sebelumnya. Sedangkan perbedaannya adalah **pertama** menambahkan variabel akuntabilitas publik berdasarkan penelitian Melia & Sari (2019). Karena dengan adanya akuntabilitas publik tentunya dapat meningkatkan kinerja manajerial pada organisasi perangkat daerah. Penambahan variabel didukung juga oleh penelitian lain yang menyatakan bahwa dengan adanya akuntabilitas publik, pemerintah daerah memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik oleh pihak internal, maupun pihak eksternal sehingga akuntabilitas publik mempengaruhi peningkatan kinerja manajerial pemerintah daerah (Asrini, 2017).

Perbedaan **kedua** adalah menambahkan variabel kejelasan sasaran anggaran berdasarkan penelitian Melia & Sari (2019). Alasan menambahkan variabel kejelasan sasaran anggaran, karena dengan adanya sasaran anggaran yang jelas dapat memberikan kemudahan organisasi perangkat daerah untuk menetapkan target anggaran serta mempermudah pelaksana anggaran dalam merealisasikannya. Penambahan variabel didukung juga oleh penelitian lain yang menyatakan bahwa tujuan dan sasaran anggaran yang jelas dalam organisasi menunjukkan fungsi utama manajemen yang dapat membantu meningkatkan kinerja (Juaini et al., 2019).

Perbedaan **ketiga** adalah objek yang diambil pada penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Magelang. Alasannya karena pemerintah Kabupaten Magelang dalam realisasi Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) masih di bawah target dan pelaksanaan penyerapan anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya mengalami kegagalan. Selain itu realisasi keuangan belanja langsung dan realisasi fisik belum maksimal.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial?
2. Apakah akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap kinerja manajerial?
3. Apakah *job relevant* information (JRI) berpengaruh terhadap kinerja manajerial?
4. Apakah akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial?
5. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial?

C. Tujuan Penelitian

1. Menguji secara empiris pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial.
2. Menguji secara empiris pengaruh akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial.
3. Menguji secara empiris pengaruh *job relevant information* (JRI) terhadap kinerja manajerial.

4. Menguji secara empiris pengaruh akuntabilitas publik terhadap kinerja manajerial
5. Menguji secara empiris pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan pada pengembangan teori perilaku di dalam literatur akuntansi. Berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja pemerintah daerah yang lebih mengkhususkan pada partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, *job relevant information* (JRI), akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi aparat pemerintah daerah. Berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah sehingga tercipta kinerja pemerintah yang efektif dan efisien.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi alasan memilih judul penelitian berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Berisi teori sebagai dasar untuk menganalisis pokok – pokok masalah dalam penelitian berupa telaah teori, hasil penelitian, terdahulu, hipotesis dan model penelitian.

BAB III METODA PENELITIAN

Berisi gambaran dan tahapan penelitian yang menjelaskan tentang populasi, sampel, metode pengambilan sampel, definisi operasional, pengukuran variabel dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis data dan pembahasan. Bagian ini menjadi titik perhatian karena dilakukan pengolahan dan analisis data menggunakan bantuan program SPSS berupa analisis deskriptif, uji validitas dan reliabilitas data, analisis regresi dan pengujian hipotesis.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Literatur

1. Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* pertama kali muncul berbarengan dengan perkembangan akuntansi. Teori *stewardship* berdasarkan teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen, di mana *steward* termotivasi untuk berkelakuan sesuai keinginan *principal*. Teori *stewardship* adalah penggambaran kondisi manajer yang termotivasi dari target hasil utama kepentingan organisasi bukan termotivasi terhadap kepentingan pribadinya (Donaldson & Davis, 1991). Pada organisasi sektor publik yang dimaksud *principal* adalah masyarakat dan *steward* adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Stewardship theory menjelaskan bahwa kepentingan bersama dijadikan dasar dari tindakan seorang manajer. Jika terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dan *steward*, maka *steward* akan berusaha bertindak sesuai dengan tindakan *principal* dan demi kepentingan bersama dapat menjadi pertimbangan yang rasional agar tercapainya tujuan bersama. Hal penting dalam *stewardship theory* adalah manajer menyelaraskan tujuannya sesuai dengan tujuan *principal* namun tidak berarti steward tidak memiliki kebutuhan.

Darini (2005) menjelaskan *bahwa* Amanah, memiliki integritas, bertindak jujur dan bertanggungjawab adalah sifat manusia yang dijadikan

dasar dalam membangun teori *stewardship*. Hal ini berarti dalam pandangan *stewardship theory*, manajemen dipercaya untuk bekerja dengan baik bagi kepentingan publik dan share holder. Teori *stewardship* menjelaskan bentuk pola kepemimpinan dan hubungan para atasan dengan bawahannya dalam sebuah organisasi menggunakan mekanisme situasional. Mekanisme ini meliputi filosofis manajemen dan perbedaan budaya organisasi, serta kepemimpinan dalam pencapaian tujuan bersama tanpa mengorbankan kepentingan masing–masing (Anton, 2010).

Teori *stewardship* digunakan karena, dapat menjelaskan tentang fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan, sehingga pelayanan publik dapat tercapai secara maksimal. Organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai wakil dari pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik di pemerintah daerah, karena kinerja yang baik akan berdampak pada tata kelola pemerintah yang baik.

2. Kinerja Manajerial

Menurut Mahsun (2014), kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian, pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Menurut Mahoney

(1963) , kinerja manajerial adalah kinerja dari individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial yang meliputi perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, pemilihan staf, negosiasi, dan perwakilan atau presentasi.

Pada proses pelaksanaan pencapaian suatu tujuan, indikator kinerja memeiliki peranan yang penting bagi suatu organisasi, yang menurut Bastian (2009) indikator kinerja adalah merupakan suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*).

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya terciptanya akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Akuntabilitas disini bukan sekedar kemampuan menunjukkan uang publik yang dibelanjakan, akan tetapi juga meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif (Mardiasmo, 2009). Menurut Mardiasmo (2009), sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial.

Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja didukung *reward and punishment*

system. Mardiasmo (2009) menyebutkan ada tiga maksud dilakukannya pengukuran kinerja sektor publik, yaitu: (1) untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, (2) untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, (3) untuk mewujudkan pertanggungjawban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

3. Partisipasi Anggaran

Partisipasi merupakan suatu konsep di mana bawahan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan sampai tingkat tertentu bersama atasannya (Robbins, 2008). Garrison et al (2010) mengemukakan bahwa anggaran adalah rencana terperinci tentang pemerolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama satu periode waktu tertentu. Anggaran menunjukkan rencana masa depan yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif yang formal.

Partisipasi anggaran merupakan suatu proses yang melibatkan individu – individu secara langsung di dalamnya dan mempunyai pengaruh terhadap penyusunan tujuan anggaran yang prestasinya akan dinilai dan kemungkinan akan dihargai atas dasar pencapaian tujuan anggaran mereka. Menurut Kenis (1979) dalam Li et al (2010) partisipasi anggaran merupakan keterlibatan seluruh manajer atau pimpinan dan bawahan berpartisipasi dalam menyiapkan anggaran dan dapat mempengaruhi tujuan anggaran dari pusat pertanggungjawaban mereka masing–masing. Selain itu, menurut Nurcahyani (2010) partisipasi anggaran adalah tahap partisipasi pegawai

dalam menyusun anggaran dan pengaruh anggaran tersebut terhadap pusat pertanggungjawaban.

Partisipasi anggaran memberikan manfaat dalam mendorong kreativitas dan meningkatkan tanggung jawab. Keikutsertaan para manajer level menengah dan bawah dalam penentuan anggaran akan bermanfaat pada keputusan yang lebih realistis sehingga tercipta kesesuaian tujuan organisasi yang lebih baik.

4. Akuntansi Pertanggungjawaban

Menurut Hansen & Mowen (2013), akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Definisi lain menurut Rudianto (2013) akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang mengakui berbagai pusat – pusat tanggung jawab pada keseluruhan organisasi itu dan mencerminkan rencana dan tindakan dan setiap pusat tanggung jawab itu dengan menempatkan penghasilan dan biaya tertentu bagi pusat yang memiliki tanggung jawab yang bersangkutan.

Karakteristik akuntansi pertanggungjawaban Mulyadi (2012), untuk dapat diterapkannya sistem akuntansi pertanggungjawaban yang memadai ada lima syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Struktur organisasi yang harus menggambarkan tanggung jawab, wewenang, dan posisi yang jelas untuk setiap unit kerja serta pembagian tugas yang jelas.

2. Dalam penyusunan anggaran setiap pusat pertanggungjawaban harus ikut serta dalam penyusunan anggaran.
3. Penggolongan biaya dipisahkan menjadi biaya yang terkendali dan biaya yang tak terkendali.
4. Terdapatnya susunan kode rekening perusahaan yang dikaitkan dengan kewenangan pengendalian pusat pertanggungjawaban.
5. Sistem pelaporan biaya untuk tiap-tiap pusat biaya kepada manajer yang bertanggungjawab.

5. *Job Relevant Information*

Job Relevant Information diartikan sebagai informasi yang memfasilitasi pembuatan keputusan yang berhubungan dengan tugas. Menurut Kren dalam Umayah (2015) mengidentifikasi dua tipe utama dari informasi dalam organisasi, yaitu: (1) informasi perilaku manajerial dalam pengambilan keputusan untuk evaluasi kinerja; dan (2) informasi untuk mengambil tindakan agar tercapai hasil lebih baik. Sementara itu Yusfaningrum & Ghozali (2005) menambahkan bahwa *Job Relevant Information* membantu bawahan dalam meningkatkan pilihan tindakannya melalui informasi usaha yang berhasil dengan baik. Kondisi ini memberikan pemahaman yang lebih baik pada kepala bidang tiap-tiap pusat pertanggungjawaban mengenai alternatif keputusan dan tindakan yang perlu dilakukan dalam mencapai tujuan.

Job Relevant Information meningkatkan kinerja melalui pemberian perkiraan yang lebih akurat mengenai lingkungan sehingga dapat dipilih

rangkaian tindakan efektif yang terbaik (Kren (1992) dalam Nugraheni (2015). Tersedianya informasi yang berhubungan dengan tugas akan meningkatkan pilihan terhadap tindakan yang direncanakan untuk mencapai tujuan. *Job Relevant Information* merupakan Informasi yang membantu manajer untuk meningkatkan kinerjanya dengan informasi lebih baik. Informasi yang diberikan manajer dalam penyusunan anggaran akan meningkatkan kemampuan individual terhadap kinerja (Yusfaningrum & Ghozali, 2005). Sehingga dengan adanya informasi yang relevan dengan tugas maka tujuan yang diharapkan akan tercapai. Menurut Kren (1992) dalam Rison (2017) *job relevant information* diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

a. Mendapat informasi yang jelas.

   Informasi harus dapat dibaca dan dipahami dengan baik agar informasi tersebut berguna bagi para pembuat keputusan.

b. Mempunyai informasi yang memadai.

   Informasi yang tersedia harus lengkap dan sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan pengguna informasi pada waktu tertentu.

c. Memperoleh informasi yang strategis.

   Informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk mengambil keputusan jangka Panjang dan memberikan kontribusi bagi tujuan organisasi.

d. Mencari informasi yang tepat.

   Informasi haruslah sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan dapat diperoleh pada saat yang tepat dan berhubungan dengan kemajuan dan perkembangan organisasi.

6. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2009) adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah *(agent)* untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2006). Akuntabilitas publik menurut Mardiasmo (2002) terdiri atas dua macam, yaitu:

a. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

b. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal accountability*)

Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Beberapa bentuk dimensi pertanggungjawaban publik oleh pemerintah daerah disampaikan oleh Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2002)

Menurutnya terdapat empat dimensi akuntabilitas publik yang harus dipenuhi organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas program, yaitu terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
2. Akuntabilitas manajerial, adalah pertanggungjawaban lembaga publik untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.
3. Akuntabilitas hukum dan kejujuran, yaitu terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*). Sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
4. Akuntabilitas keuangan, adalah pertanggungjawaban Lembaga – Lembaga publik untuk menggunakan uang publik (*money public*) secara ekonomi, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi.

7. Kejelasan sasaran anggaran

Salah satu karakteristik sistem penganggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Kenis (1979) dalam Putra (2013) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung-jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Selain itu, menurut Locke (1968) sasaran anggaran yang spesifik akan lebih

produktif bila dibandingkan dengan tidak adanya sasaran yang spesifik, karena akan menyebabkan para pegawai merasa kebingungan, tertekan, dan merasa tidak puas. Menurut Locke dan Latham (1984) dalam Samuel (2008), agar pengukuran sasaran efektif ada 7 indikator yang diperlukan:

1. Tujuan, membuat secara terperinci tujuan umum tugas-tugas yang harus dikerjakan.
2. Kinerja, menetapkan kinerja dalam bentuk pertanyaan yang diukur.
3. Standar, menetapkan standar atau target yang ingin dicapai.
4. Jangka Waktu, menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengerjaan.
5. Sasaran Prioritas, menetapkan sasaran yang prioritas.
6. Tingkat Kesulitan, menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan dan pentingnya.
7. Koordinasi, menetapkan kebutuhan koordinasi.

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Telaah Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Iswahyudi (2019)	Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Kota Jayapura)	Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Tabel 2.1
Telaah Penelitian Sebelumnya (lanjutan)

	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
2.	Melia & Sari (2019)	Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok Selatan)	Akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
3.	Silitonga & Astuty (2018)	Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Pengendalian Diri (*Locus Of Control*) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada (OPD) Kota Pematangsiantar)	Partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
4.	Fidayati & Yuliani (2017)	Analisis Determinasi Kinerja Manajerial dengan *Job Relevant Information* (JRI) Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada OPD di Kabupaten Magelang)	Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik berpengaruh terhadap *Job Relevant Information* (JRI) dan *Job Relevant Information* berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
5.	Fidayati & Yuliani (2017)	Analisis Determinasi Kinerja Manajerial dengan *Job Relevant Information* (JRI) Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada OPD di Kabupaten Magelang)	Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas publik berpengaruh terhadap *Job Relevant Information* (JRI) dan *Job Relevant Information* berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Tabel 2.1
Telaah Penelitian Sebelumnya (lanjutan)

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
6.	Candrakusuma & Jatmiko (2017)	Dampak Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Akuntabilitas Publik, Partisipasi Anggaran, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial	Akuntabilitas publik dan partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
7.	Ernawati (2017)	Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Skpd Kabupaten Pati)	Partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
8.	Khoriah & Wiratno (2017)	Pengaruh Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi, Kecukupan Anggaran, dan Job Relevan Information Terhadap Kinerja Manajerial	Partisipasi anggaran dan job relevant information tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial
9.	Darmawan et al (2016)	Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial	Akuntabilitas publik dan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
10.	Lukito & Dwi (2015)	Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggung jawaban Terhadap Kinerja Manajerial	Partisipasi anggaran dan akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap kinerja manajerial.
11.	Saraswati & Aisyah (2015)	Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Job Relevant Information Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta)	Partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial dan job relevant information tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Sumber: data penelitian terdahulu 2020

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial.

Partisipasi anggaran merupakan keterlibatan seluruh manajer atau pimpinan dan bawahan berpartisipasi dalam menyiapkan anggaran dan dapat mempengaruhi tujuan anggaran dari pusat pertanggungjawaban mereka masing–masing (Kenis (1979) dalam (Li *et al*., 2010). Partisipasi anggaran yang melibatkan bawahan dan manajer akan mendorong tercapainya kesepakatan sehingga akan meningkatkan kinerja manajerial.

Pada organisasi perangkat daerah, partisipasi anggaran terdiri atas tingkat manajer dan bawahan. Kaitannya teori *stewardshi*p dengan partisipasi anggaran pada organisasi perangkat daerah yaitu di mana situasi dijelaskan para manajer tidak termotivasi atas tujuan individu tetapi lebih termotivasi untuk mencapai tujuan organisasi. Manajer dikondisikan sebagai pelayan (*steward*) yang termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan pemilik (*principal*) dan manajer tersebut berperilaku tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* akan berusaha mencapai sasaran organisasi (Donaldson & Davis, 1991).

Penelitian yang dilakukan oleh Iswahyudi (2019), menunjukkan hasil bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya keterlibatan antara manajer dengan bawahan dalam ke ikut sertaannya menyusun anggaran akan meningkatkan kinerja manajerialnya. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Khoriah & Wiratno (2017), Lukito & Dwi (2015), dan Suparmun (2015) yang juga

menemukan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Partisipasi anggaran memberikan kesempatan bagi para manajer dan bawahan untuk ikut menyusun anggaran. Pada umumnya tujuan menyeluruh dari anggaran dikomunikasikan kepada para manajer, kemudian bawahan membantu mengembangkan anggaran yang dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Partisipasi tingkat manajer dan bawahan dalam keikutsertaan untuk menyusun anggaran dapat berpengaruh pada anggaran tersebut terhadap pusat pertanggungjawaban manajer yang bersangkutan sehingga dengan adanya keterlibatan tersebut akan mendorong tercapainya kesepakatan antara manajer atau kuasa anggaran dengan bawahan atau pelaksana anggaran sehingga akan meningkatkan kinerjanya.

H1. Partisipasi Anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial.

2. Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial

Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggung jawaban menurut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka (Hansen & Mowen, 2013). Akuntansi pertanggungjawaban terdapat empat elemen penting, yaitu pemberian tanggung jawab, pembuatan ukuran kinerja atau *benchmarking*, pengevaluasian kinerja,

dan pemberian penghargaan. Adanya laporan pertanggungjawaban setiap unit dapat digunakan untuk menilai kinerja kepala seksi atau kepala bidang.

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang berada di bawah kepemimpinan pemerintah pusat, memiliki kewajiban untuk membuat laporan dari setiap kegiatan yang dilakukan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan wewenang kepada pemerintah pusat. Sehingga dengan adanya akuntansi pertanggungjawaban, akan meningkatkan kinerja manajerialnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Kartika (2019), menunjukkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penerapan akuntansi pertanggungjawaban akan meningkatkan kinerja manajerial. Sejalan dengan penelitian Silitonga & Astuty (2018), Natalya & Kusumawardani (2016), dan Lukito & Dwi (2015) menunjukkan bahwa akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Akuntansi pertanggungjawaban dapat memberikan kemudahan manajer puncak dalam mengontrol setiap hierarki pusat pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban juga dapat mengkoordinasi setiap aktivitas dari pusat-pusat pertanggungjawaban dalam organisasi dan melakukan evaluasi atas kemampuan manajer sebagai pusat pertanggungjawaban.

H2. Akuntansi Pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial

3. Pengaruh *Job Relevant* Information *(JRI)* Terhadap Kinerja Manajerial

Job relevant information (JRI) diartikan sebagai informasi yang memfasilitasi pembuatan keputusan yang berhubungan dengan tugas. Menurut Yusfaningrum & Ghozali (2005) *job relevant information* membantu bawahan dalam meningkatkan pilihan tindakannya melalui informasi usaha yang berhasil dengan baik. Tersedianya informasi yang relevan dengan tugas maka umpan balik di dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran akan dirasakan manfaatnya sehingga mempertinggi kinerja manajerial.

Teori *stewardship,* telah memunculkan asumsi dasar yang menyatakan bahwa kepentingan bersama dijadikan sebagai dasar dari tindakan seorang manajer. Oleh karena itu dengan adanya *job relevant information* dapat membantu manajer dalam memilih tindakan yang terbaik melalui upaya yang diinformasikan secara lebih baik.

Penelitian, Sari et al (2017) menunjukkan hasil bahwa *job relevant information* (JRI) berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak informasi yang didapatkan maka akan semakin efektif dan efisien kinerja manajerial. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fidayati & Yuliani (2017), Ilah & Yanto (2016), dan Sawitri et al. (2015) menunjukkan hasil bahwa *job relevant information* (JRI) berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial.

Job relevant information memfasilitasi pembuatan keputusan para manajer atau *bawahan* untuk memilih tindakan yang terbaik agar tercapai hasil

yang baik. *Job relevant information juga* memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai alternatif keputusan dan tindakan yang perlu dilakukan dalam mencapai tujuan.

H3. *job relevant information* (JRI) berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial.

4. Pengaruh Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2006). Adanya akuntabilitas publik tentunya dapat meningkatkan kinerja manajerial karena semakin tinggi tingkat pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan semakin baik pula kinerjanya mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan teori *stewardship*, pemerintah daerah adalah *steward* yang memiliki fungsi pengelolaan sumber daya dan masyarakat selaku principal sebagai pemilik sumber daya. Oleh karena itu pemerintah selaku *steward* memberikan pertanggungjawabannya kepada publik dengan pengungkapan, penyajian, dan pelaporan atas seluruh kegiatan dan aktivitas kepada masyarakat selaku pihak *principal*.

Penelitian yang dilakukan oleh Melia & Sari (2019), menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas publik berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya akuntabilitas publik tentunya dapat meningkatkan kinerja manajerial karena semakin tinggi tingkat

pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilaksanakan semakin tinggi pula kinerja mencapai tujuan organisasi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurchasanah & Mildawati (2018), Fidayati & Yuliani (2017), dan Darmawan et al. (2016) membuktikan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Akuntabilitas publik sangat penting dalam peningkatan kinerja manajerial, karena dengan adanya akuntabilitas kepada masyarakat, masyarakat tidak hanya mengetahui anggaran tersebut tetapi juga mengetahui pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan sehingga pemerintah akan berusaha dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan kinerja. Akuntabilitas publik dapat meningkatkan kinerja manajerial, karena semakin tinggi tingkat pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilakukan semakin baik pula kinerjanya dalam mencapai tujuan organisasi.

H4. Akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial.

5. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung-jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Kenis (1979) dalam Putra (2013). Tujuan dan sasaran anggaran yang jelas dalam organisasi menunjukkan fungsi utama manajemen yang dapat membantu meningkatkan kinerja manajerial.

Teori *stewardship* menjelaskan situasi di mana manajer yang termotivasi dari target tujuan utama kepentingan organisasi bukan termotivasi

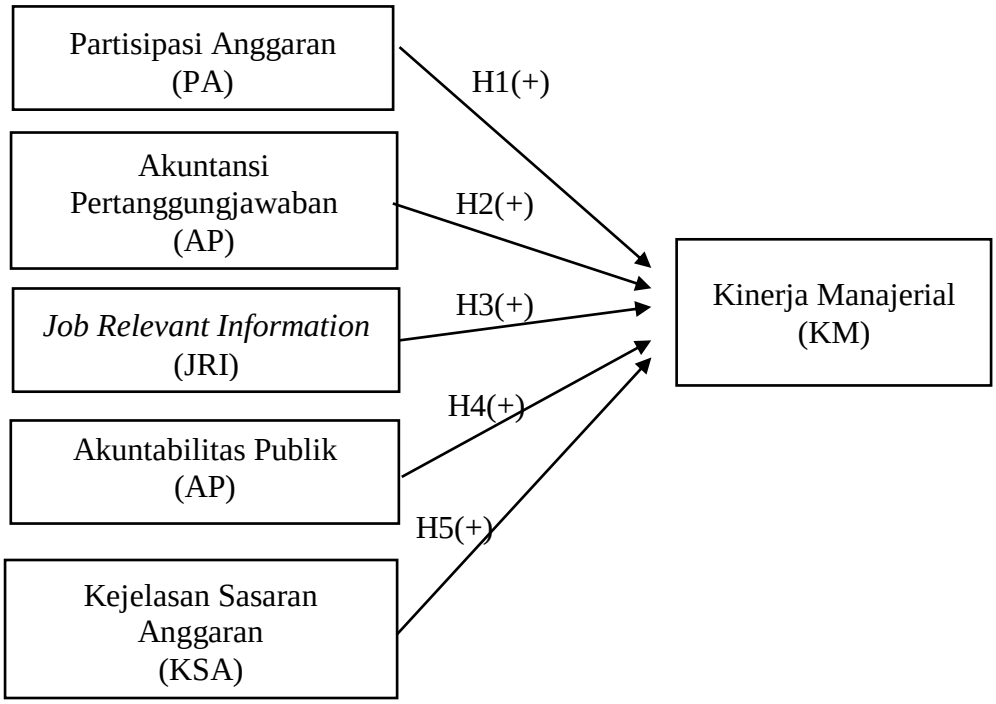
dari kepentingan pribadinya, sehingga kedua belah pihak antara *steward* dan *principal* memiliki tujuan yang sama maka *steward* akan bertindak sesuai dengan keinginan *principal*. Oleh karena itu diharapkan dengan adanya kejelasan sasaran anggaran dapat mengetahui apakah anggaran sudah sesuai sasaran yang diharap atau belum.

Penelitian yang dilakukan oleh Natalia et al (2019), menunjukkan hasil bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Efrizar (2017), Candrakusuma & Jatmiko (2017), dan Murhaban & Helmiyah (2016), menunjukkan hasil bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

Kejelasan sasaran anggaran akan mempermudah para manajer dan bawahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan – tujuan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Sasaran anggaran harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab dalam mengelola anggaran.

H5. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial.

D. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah para manajerial yang bekerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Magelang. Populasi diambil pada wilayah tersebut karena Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan organisasi sektor publik yang bertindak sebagai manajerial pemerintah daerah.

2. Sampel

Teknik pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode pemilihan sampel non probabilitas yaitu dengan pemilihan sampel bertujuan (*purposive sampling*). *Purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu (umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian). Berdasarkan metode tersebut maka penentuan sampel akan dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu:

1) Memiliki masa jabatan minimal satu tahun pada OPD Kabupaten Magelang.
2) Menduduki posisi jabatan sebagai Kepala UPT, Sekretaris, Kasubag Keuangan, Staf Keuangan, Kepala sie, Kepala bidang, Kepala bagian, Kasubag dan Kepala sub bidang.

B. Teknik Pengambilan Sampel

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini adalah menggunakan data primer. Data primer adalah data yang langsung diambil dari sumber asli tanpa adanya perantara yang didapat langsung dari responden (Sugiyono, 2012). Data primer ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yaitu aparatur yang menduduki jabatan yang terdiri dari Kepala UPT, Sekretaris, Kasubag Keuangan, Staf Keuangan, Kepala Sie, Kepala bidang, Kepala bagian, Kasubag dan kepala sub bidang di OPD Kabupaten Magelang.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angket yang berisi kuesioner. Kuesioner dibagikan kepada responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, yaitu pihak – pihak yang ikut serta dalam penyusunan anggaran pada setiap dinas/OPD pemerintah Kabupaten Magelang. Kemudian kuesioner akan diambil pada waktu dan tanggal yang disepakati oleh peneliti dan responden. Kuesioner yang diisi oleh responden, diseleksi terlebih dahulu sesuai dengan kriteria dalam penelitian.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Tabel 3.1
Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
Variabel Dependen			
1 Kinerja Manajerial	Kinerja manajerial adalah kinerja dari individu anggota organisasi dalam kegiatan manajerial yang meliputi perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, pemilihan staf, negosiasi, dan perwakilan atau presentasi (Mahoney et al (1963) dalam (Warisno., 2008).	Instrumen yang digunakan mengadopsi hasil yang dikembangkan oleh Putra (2013) dan terdiri dari 8 pernyataan. Indikator yang digunakan adalah: 1. Perencanaan 2. Investigasi 3. Pengkoordinasian 4. Evaluasi 5. Pengawasan 6. Pemilihan staff 7. Negosiasi Perwakilan	Skala Likert 1-5.
Variabel Independen			
1. Partisipasi Anggaran	Partisipasi anggaran adalah tahap partisipasi pegawai dalam menyusun anggaran dan pengaruh anggaran tersebut terhadap pusat pertanggungjawaban (Nurcahyani, 2010).	Instrumen yang digunakan mengadopsi hasil yang dikembangkan oleh Milani (1975) dan terdiri dari 6 pernyataan. Indikator yang digunakan adalah: 1. keikutsertaan di dalam penyusunan anggaran 2. kepuasan di dalam penyusunan anggaran 3. kebutuhan memberikan pendapat 4. kerelaan dalam memberikan pendapatan 5. besarnya pengaruh terhadap penetapan anggaran akhir	Skala Likert 1-5.

Tabel 3.1
Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel (lanjutan)

	Variabel	Definisi	Indikator Variabel	Skala
			6. seringnya atasan atau rekan sejawat meminta pendapat saat anggaran disusun.	Skala Likert 1-5.
2.	Akuntansi Pertanggungjawaban	Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka (Hansen, 2013).	Instrumen yang digunakan mengadopsi hasil yang dikembangkan oleh Trisnawati (2006). Terdiri dari 24 item pernyataan. Indikator yang digunakan yaitu: 1. struktur organisasi 2. perencanaan atau anggaran 3. sistem akuntansi 4. pelaporan	Skala Likert 1-5.
3.	*Job Relevant Informaation*	*Job Relevant Information* adalah informasi yang memfasilitasi pembuatan keputusan yang berhubungan dengan tugas (Kren dalam Umayah (2015))	Instrumen yang digunakan mengadopsi hasil yang dikembangkan oleh Kren (1992). Terdiri dari 10 pertanyaan. Indikator yang digunakan yaitu: 1. mendapat informasi yang jelas 2. mempunyai informasi yang memadai. 3. Memperoleh informasi yang strategi 4. Mencari informasi yang tepat	Skala Likert 1-5.

Tabel 3.1
Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel (lanjutan)

No	Variabel	Definisi	Indikator Variabel	Skala
4.	Akuntabilitas Publik	Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mahsun, 2006).	Instrumen yang digunakan mengadopsi hasil yang dikembangkan oleh Putra (2013). Terdiri dari 9 pernyataan. Indikator yang digunakan yaitu: 1. Akuntabilitas kejujuran 2. Akuntabilitas hukum 3. Akuntabilitas program 4. Akuntabilitas proses 5. Akuntabilitas kebijakan	Skala Likert 1-5.
5.	Kejelasan Sasaran Anggaran	Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Kenis 1979).	Instrumen yang digunakan mengadopsi hasil yang dikembangkan oleh Bangun (2009) yang berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negri No.13 Tahun 2006. Terdiri dari 6 pernyataan. Indikator yang digunakan yaitu: 1. Pemberian kewenangan dalam menentukan jumlah anggaran 2. Program dan kegiatan 3. Keterlibatan pegawai 4. Skala prioritas 5. Penambahan dan mutasi pegawai.	Skala Likert 1-5.

D. Alat Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah suatu metode-metode pengumpulan, penyajian, dan pengaturan data yang berguna untuk membuat gambaran yang jelas variasi sifat data yang dapat mempermudah proses analisis dan interpretasi. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian (nama responden, jenis kelamin, umur, jenjang Pendidikan, tingkat jabatan dan lama masa kerja). Menurut Ghozali (2018), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, *minimum*, *maksimum*, *sum*, *range*, *kurtosis* dan *swekness* (kemencengan distribusi).

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018). Uji validitas instrumen kuesioner penelitian ini menggunakan uji validitas dengan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA). *Confirmatory Factor Analysis* digunakan untuk menguji apakah pengelompokkan indikator berdasarkan variabel latennya konsisten berada dalam konstruknya atau tidak.

Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor adalah data matriks harus memiliki korelasi yang cukup (*sufficient correlation*). Uji *Barlett of Spheriicity* merupakan uji statistik untuk menentukan ada tidaknya

korelasi antar variabel. Semakin besar sampel menyebabkan *Barlett test* semakin *sensitive* untuk mendeteksi adanya korelasi antar variabel. Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat *interkorelasi* antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah *Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequancy* (KMO MSA). Nilai KMO MSA bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai *cross loading* yang dikehendaki harus > 0,50 untuk dapat dilakukan analisis faktor (Ghozali, 2018).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu dengan menggunakan alat ukur yang sama. Uji reliabilitas dimaksud untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama. Pengujian dilakukan dengan menghitung *Cronbach Alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 (Ghozali, 2018).

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Suatu teknik statistik yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel dependen dan beberapa variabel independen (Ghozali, 2018). Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$\mathrm{KM} = \alpha + \beta 1\mathrm{PA} + \beta 2\mathrm{AP} + \beta 3\mathrm{JRI} + \beta 4\mathrm{AP} + \beta 5\mathrm{KSA} + \mathrm{e}$$

Keterangan:

KM	= Kinerja Manajerial
α	= Konstanta
β1 - β5…	= Koefisien Korelasi
PA	= Partisipasi Anggaran
AP	= Akuntansi Pertanggungjawaban
JRI	= *Job Relevant Information*
AP	= Akuntabilitas Publik
KSA	= Kejelasan Sasaran Anggaran
e	= Eror

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R^2*)

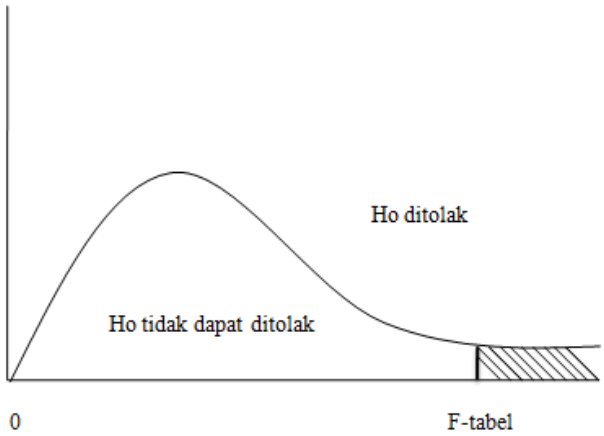
Menurut Ghozali (2018), Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Uji R^2 menunjukkan potensi pengaruh semua variabel independen yaitu Partisipasi Anggaran, Akuntansi Pertanggungjawaban, *Job Relevant Information,* Akuntabilitas Publik, dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Manajerial. Nilai koefisien determinasi yaitu antara nol dan satu, semakin mendekati 0 maka koefisien determinasi semakin kecil pengaruhnya terhadap variabel bebas, sebaliknya semakin mendekati 1 besarnya koefisien determinasi semakin besar pengaruhnya terhadap variabel bebas (Ghozali, 2018).

b. Uji F *(Goodnes of fit test)*

Ghozali (2018) Uji statistik F digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir suatu nilai aktual (*goodness of fit*). Uji F menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fit* atau tidak. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji F adalah berupa level signifikan 5%

dengan derajat kebebasan pembilang df = k dan derajat kebebasan penyebut (df) = n-k-1 di mana k adalah jumlah variabel bebas. Pengujian dilakukan dengan membandingkan kriteria:

1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau P *value* < α = 0,05, maka model yang digunakan dalam penelitian bagus (*fit*).
2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau P *value* > α = 0,05, maka model yang digunakan dalam penelitian tidak bagus (tidak *fit*).

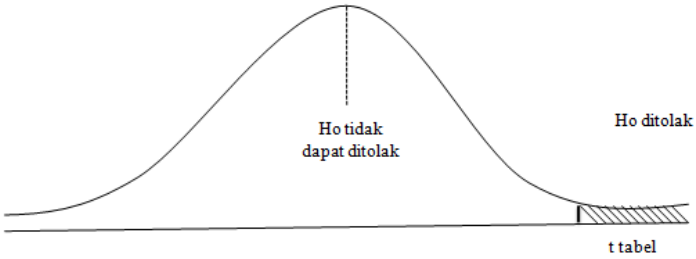


Gambar 3.1
Uji F

c. Uji Statistik t *(t-test)*

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Uji t digunakan untuk mengukur signifikansi pengaruh pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t_{hitung} masing-masing koefisien regresi dengan t_{tabel} (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Ketentuan menilai hasil hipotesis uji t adalah menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan df = n-1 (Ghozali, 2018). Dasar kriteria penerimaan hipotesis positif:

1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau *p value* < 0,05 maka Ho tidak diterima dan Ha diterima, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.
2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau *p value* > α = 0,05 maka Ho diterima dan Ha tidak diterima, artinya variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variablel dependen.



Gambar 3.2
Uji t Kriteria Positif

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, *job relevant information*, akuntabilitas publik, dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial pada OPD Kabupaten Magelang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 81 responden. Temuan hasil penelitian ini partisipasi anggaran, dan akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Sedangkan *job relevant information*, akuntabilitas publik, dan kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan dengan menggunakan metode kuesioner oleh karena itu terkadang jawaban yang diberikan oleh responden tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya.
2. Penelitian ini memiliki keterbatasan variabel, karena variabel yang diteliti hanya partisipasi anggaran, akuntansi pertanggungjawaban, *job relevant information*, akuntabilitas publik, dan kejelasan sasaran anggaran. sedangkan masih ada variabel lain yang perlu ditinjau kembali yang mempengaruhi kinerja manajerial.

C. Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara secara langsung sehingga data yang dihasilkan lebih akurat dan responden dapat memahami pertanyaan yang diajukan.
2. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel lain yang mungkin dapat berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah misalnya komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan.

DAFTAR PUSTAKA

-------- . (2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.*

-------- . (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.*

Aini, E. F. (2018). *Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Di Pasuruan*. *91*(5), 1689–1699. Https://Doi.Org/10.1017/Cbo9781107415324.004

Amalia, R. (2019). *Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Kasus Pada Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bppkad) Kota Banjar).* Https://Doi.Org/10.1017/Cbo9781107415324.004

Asrini. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Skpd Di Pemerintah Daerah Kota Palu. *Katalogis*, *5*(1), 52–58.

Bangun, A. (2009). Skpd Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang) Oleh Andarias Bangun Skpd Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang). *Tesis*, 111.

Bastian, I. (2009). *Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia*. Bpfe Universitas Gajah Mada.

Candrakusuma, D. dan Jatmiko, B. (2017). Dampak Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Akuntabilitas Publik, Partisipasi Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (Jbe)*, *24*(1), 87–93.

Darmawan, R., Azlina, N., dan Hariyani, E. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Di Skpd Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, *3*(1), 792–806.

Donaldson, L., dan Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory Or Agency Theory: *Australian Journal Of Management*. Https://Doi.Org/10.1177/031289629101600103

Efrizar, R. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran,Akuntabilitas Publik, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Manajerial. *Jom Fekon*, *4*(1), 1726–1740.

Ernawati, N. (2017). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Skpd Kabupaten Pati). *Indonesia, Jurnal Akuntansi*, *6*(2), 141–156.

Garrison, R. H., Noreen, E. W., Brewer, P. C., dan Mcgowan, A. (2010). Managerial Accounting. *Issues In Accounting Education*. Https://Doi.Org/10.2308/Iace.2010.25.4.792

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hansen, D. ., dan Mowen, M. (2013). *Akuntansi Manajerial*. Salemba Empat.

Heski, P., Purwanti, D. T., dan Fidayati, A. (2017). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik Dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris Pada Skpd Kabupaten Magelang). *University Research Colloquium Universitas Muhammadiyah Magelang*, *Issn 2407-*, 345–352.

Ilah, F., dan Yanto, H. (2016). Determinan Kinerja Manajerial Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus. *Accounting Analysis Journal*, *5*(1), 1–9. https://doi.org/10.15294/aaj.v5i1.9750

Ini Pesan Bupati Magelang Dalam Rakor Pok Triwulan I 2019. (2019). https://magelangkab.go.id

Inspektorat Kabupaten Magelang. (2017). *Lhe Inspektorat Kabupaten Magelang*. www.magelangkab.go.id

Iswahyudi, B. J. C. P. dan A. H. C. W. (2019). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Motivasi Kerja Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Di Kota Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*. Https://Doi.Org/10.1017/Cbo9781107415324.004

Juaini, A., Herwanti, T., dan Furkan, L. M. (2019). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Struktur Desentraliasasi Kinerja Manajerial Skpd Lombok Barat. *E-Jurnal Akuntansi*, 658–672.

K, R. F. (2018). *Realisasi Fisik Tak Sampai 80%, Bupati Magelang Tegur Opd Bandel*. Https://Jogja.Tribunnews.Com

Kanji, L. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Skpd Di Kota Makassar. *Bongaya Journal For Research In Accounting*, *1*, 58–64.

Kementrian Keuangan. (2019). *Apbn 2019*.

Khoriah, K., dan Wiratno, A. (2017). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi, Kecukupan Anggaran, Dan Job Relevan Information Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan*, *4*(2), 222–233.

Li, W., Nan, X., dan Mo, Z. (2010). Effects Of Budgetary Goal Characteristics On Managerial Attitudes And Performance. *2010 International Conference On Management And Service Science, Mass 2010*. Https://Doi.Org/10.1109/Icmss.2010.5578521

Lukito Endang Dwi, dan M. S. R. (2015). Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, *Vol 4*, *No 12 (2015)*.

Mahoney, Et Al. (1963). *Development Of Managerial Performance: A Research Approach*. South Western Publishing.

Mahsun, M. (2006). *Akuntansi Sektor Publik* (1st Ed.). Bpfe-Yogyakarta.

Mahsun, M. (2014). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Bpfe Universitas Gajah Mada.

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Yogyakarta.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.Yogyakarta

Melia, P., dan Sari, V. F. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, *1*(3), 1068–1079.

Mulyadi. (2012). *Akuntansi Manajemen; Konsep, Manfaat Dan Rekayasa* (Ketiga). Salemba Empat.

Murhaban., dan Helmiyah. (2016). *Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Skpd Di Kota Lhokseumawe*. *2*(November), 11–25.

Natalia, P. L., Kalangi, L., dan Warongan, J. D. . (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Transparansi Dan Pengendalian Akuntansi Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Kinerja Manajerial Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*. https://doi.org/10.32400/gc.14.1.22312.2019

Natalya, B., dan Kusumawardani, D. R. D. A. (2016). Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan. *Ekonomi Dan Keuangan*, *13*. https://doi.org/10.1017/cbo9781107415324.004

Nengsy, H. (2019). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Akuntansi Pertanggungjawaban Dan Job Relevant Information Terhadap Kinerja Manajerial Pada Skpd Kabupaten Indragiri Hilir. *Akuntansi Dan Keuangan*, *8*. https://doi.org/10.1017/cbo9781107415324.004

Ningrum, M. S., dan Mahardhika, A. S. (2020). Determinan Kinerja Manajerial Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Di Kabupaten Kebumen. *Organizational Behavior And Human Performance*, *3*. https://doi.org/10.1016/0030-5073(68)90004-4

Nugraheni, A. C. (2015). Determinan Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, *7*(2), 129–138. https://doi.org/10.15294/jda.v7i2.4123

Nurcahyani, K. (2010). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Komitmen Organisasi Dan Persepsi Inovasi Sebagai Variabel Intervening. *Skripsi Universitas Diponegoro*. http: //eprints.undip.ac.id/23124/

Nurchasanah, S. P., dan Mildawati, T. (2018). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, *7*.

Pratiwi, W., dan Kartika, A. A. (2019). Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban, Komitmen Organisasi, Dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial. *Wahana*, *22*(1), 50–60. https://doi.org/10.35591/whn.v22i1.149

Putra, D. (2013). Pengaruh Akuntabilitas Publik Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, *1*(1), 1–23.

Ramadhini, A. S., Ritonga, K., dan Taufik, T. (2019). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Gaya Kepemimpinan, Motivasi, Budaya Organisasi, Dan Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Opd Provinsi Riau). *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, *Xi*(1), 23–37.

Rison. (2017a). Pengaruh Komitmen Organisasi, Job Relevant Information Dan Locus Of Control Terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kabupaten Pasaman Barat). *Skripsi Universitas Negri Padang*.

Rison. (2017b). Pengaruh Komitmen Organisasi, Job Relevant Information Dan Locus Of Control Terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kabupaten Pasaman Barat). *Akuntansi*, *6*, 5–9.

Rudianto. (2013). Akuntansi Manajemen Informasi Untuk Pengmbilan Keputusan Strategis. In *Akuntansi Manajemen*.

S, R. (2008). *Perilaku Organisasi, Jilid I Dan Ii Alih Bahasa : Hadyana Pujaatmaja*. Prenhallindo.

Safitri, D., Agusti, R., dan Nugraha, V. (2015). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, *2*(2), 33930.

Samuel. (2008). *Behavioral Accounting*. Western Publishing Co.

Saraswati, G. P., dan Aisyah, M. N. (2016). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Job Relevant Information Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Dinas Pemerintah Kota Yogyakarta). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, *4*(2). https://doi.org/10.21831/nominal.v4i2.8005

Sari, D. W., Arfan, M., dan Abdullah, S. (2017). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kepuasan Kerja, Job Relevant Information Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Manajerial Kejaksaan Negeri Wilayah Aceh. *Jurnal Megister Akuntansi*, *6*(2), 20–31. http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/jaa/article/view/7737

Sawitri, M., Purnamawati, I. G. A., dan Herawati, N. T. (2015). Pengaruh Partisipasi Penyusunana Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Sistem Pengendalian Internal, Akuntabilitas Publik Dan Job Relevant Information Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pasa Skpd

Kabupaten Bangli). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, *3*(1), 1–11.

Silitonga, H. P., dan Astuty, W. (2018). *Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Pengendalian Diri (Locus Of Control) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Kota Pematangsiantar)*.

Solekhah, Y., Ruliana, T., dan Laif, I. N. (2017). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggararan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Desentralisasi Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Manajerial Skpd (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Samarinda). *Akuntansi*, *53*(9), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/cbo9781107415324.004

Suparmun, H. (2015). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Komitmen Organisasi Dan Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Moderasi. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, *17*(2), 77–84. https://doi.org/10.19184/bisma.v11i2.6308

Syukri, M., Surasni, N. K., dan Furkan, L. M. (2019). Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Job Relevant Information Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, *29*(3), 987. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i03.p06

Ufairah, A. N., dan Zamzami, H. S. T. (2016). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Evaluasi Anggaran, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Kasus Pada Pemerintahan Provinsi Jambi) 1)*.

Umayah, A. D. (2015). Pengaruh Sistem Reward, Job Relevant Information (Jri), Dan Manager's Value Orientation Towards Innovation (Voi Manajer) Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Kantor Pusat Pt Wika Gedung Jakarta. *Skripsi Universitas Negri Yogyakarta*. https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.1969.tb04998.x

Warisno. (2008). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. *Tesis, Universitas Sumatera Utara*.

Yuliani, N. L., dan Fidayati, A. (2017). Analisis Determinasi Kinerja Manajerial Dengan Job Relevant Information (Jri) Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Opd Di Kabupaten Magelang). *The 6th University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang*, 411–422.

Yusfaningrum, K., dan Ghozali, I. (2005). *Analisis Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Komitmen Tujuan*

Anggaran Dan Job Relevant Information (Jri) Sebagai Variabel Intervening (Penelitian Terhadap Perusahaan Manufaktur Di Indonesia).